

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun mempunyai banyak aspek primer yang berupa miskin asset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek skunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Banyak masyarakat yang rela melakukan apa saja demi kelangsungan hidupnya. Pada masa lalu itu lapangan pekerjaan sangat tidak valid sehingga banyak masyarakat yang mempertaruhkan tenaga fisik untuk memperoleh upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang sedang berkembang ini, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan masyarakat dalam membiayai kesehatan, kurangnya akses

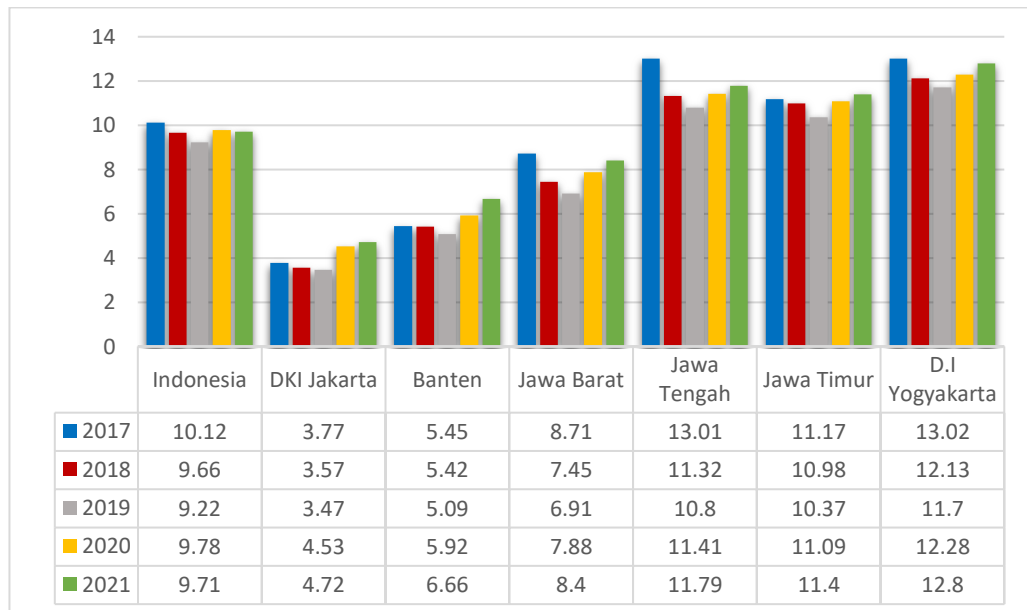
kepelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lebih parahnya kemiskinan menyebabkan jutaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan bisa terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan untuk menyerap pengangguran sehingga mereka tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk membiayai hidupnya. Disamping itu perbandingan distribusi pendapatan yang timpang antara penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah juga memicu terjadinya kemiskinan. Contohnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak bisa merasakan infrastruktur pembangunan ekonomi dengan baik sehingga tidak memungkinkan mereka berpenghasilan tinggi. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan mempunyai peluang lebih besar untuk berpenghasilan tinggi karena telah merasakan infrastruktur dengan baik.

Pembangunan suatu wilayah tak lepas dari keberhasilan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang menjadi perhatian dalam menumbuhkan tingkat perekonomian suatu negara. Negara Indonesia memiliki wilayah dengan tingkat penghasilan pemasukan tinggi yakni di DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, namun dengan pendapatan wilayah tinggi dari masyarakat dengan tingkat gaya hidup yang tinggi namun masih banyak masyarakat dengan taraf hidup dibawah garis kemiskinan. Perlu ditinjau kembali berkaitan dengan ketimpangan masyarakat yang terjadi di DKI Jakarta sebagai bentuk respon terhadap pembangunan bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam lingkup sosial.

Ibu Kota DKI Jakarta yang merupakan pusat kegiatan perekonomian nasional. Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat hal ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar Rp 110,46 juta per tahun (USD 12,270). Saat ini sudah lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. yang mana terdapat banyak dikembangkan segala jenis bisnis, industri dan juga pembangunan. Dibalik semua itu, masih terjadi ketimpangan antara kalangan atas dengan kalangan bawah, masih banyak jumlah penduduk miskin yang berdomisili di Jakarta, dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Dalam mengamati perkembangan tingkat kemiskinan perlu adanya data akurat yang diperoleh dari sumber terpercaya lembaga pemerintah. data hasil riset survei sosial ekonomi nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, memperoleh hasil angka kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta. Disajikan pada gambar Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dan di Indonesia sebagai berikut;



Gambar 1.1 Presentase Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2020 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada gambar 1.1 presentase tingkat kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi yang masih berada di angka 9 persen. Dapat dilihat pada gambar diatas menunjukkan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa yang terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta.

Presentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017-2018 mengalami fluktuasi. Dilihat pada tahun 2017 berada di angka 3,77 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga berada pada angka 3,47 persen, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020-2021, pada tahun 2020 berada pada angka 4.53 persen, sedangkan pada tahun 2021 berada pada angka 4,72. Tingkat kemiskinan terendah berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,47 persen, sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,72.

Wabah virus *covid-19* telah mengguncang dunia sejak awal 2020. Pandemi ini menyebar secara global meliputi era geografis yang luas. Hal ini berdampak pada cepatnya lonjakan kemiskinan pasca bencana *covid-19*. Sesungguhnya, angka kemiskinan DKI Jakarta sudah cenderung melandai sejak tahun 2000 sebesar 4,96 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga berada pada angka 3,47 persen. Namun sejak maret 2020 atau sejak *covi-19* mulai mewabah, presentase penduduk miskin nasional maupun DKI Jakarta cenderung meningkat.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2021 mencapai 4,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 501,92 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2020 (4,69 persen atau 496,84 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat tipis sebesar 0,09 poin atau meningkat sebesar 5,08 ribu orang.

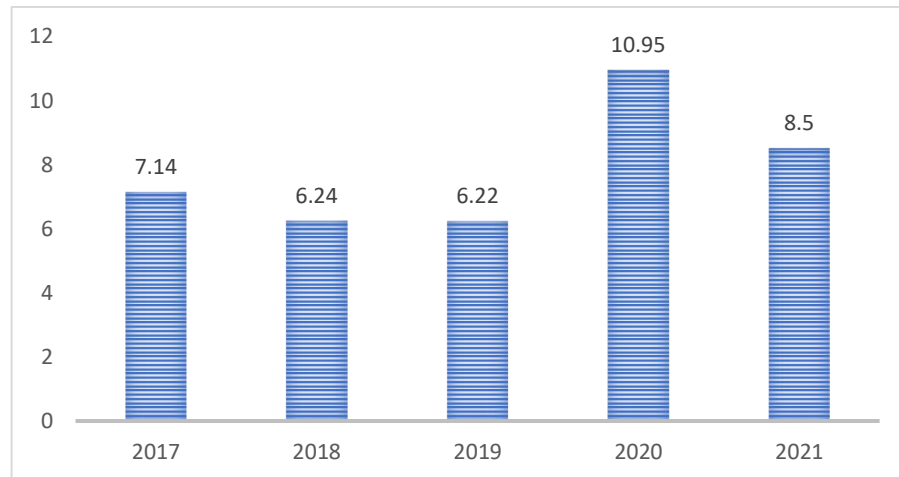
Selain itu tingkat pengangguran juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang semakin meningkat mengakibatkan permasalahan yang besar terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Pengangguran yang terjadi berlarut-larut dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhn sehari-hari seperti makan, pakaian dan lain-lain sehingga angka ketergantungan antara tenaga kerja dengan pengangguran tinggi. Pengangguran dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam Angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan dan belum dapat memperolehnya (Sukirno 2006:13).

Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi akan menjadi masalah bagi suatu perekonomian. Dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah banyaknya sumber daya yang terbuang dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali secara teori jika masyarakat menganggur berarti mereka tidak mempunyai pekerjaan dan juga penghasilan yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kemiskinan (Windra et al.,2016).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) karena tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Faktor pengangguran yang tinggi merupakan salah satu penyebab kemiskinan masih melanda Ibu Kota Jakarta hingga saat ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi ciri khas khusus dari DKI Jakarta. Dimana tercatat pada tahun 2017 mencapai 7,14 persen. Banyaknya pengangguran disebabkan oleh terus bertambahnya penduduk yang melakukan urbanisasi ke DKI Jakarta setiap tahunnya yang mana selalu mengalami peningkatan, selain itu masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan tingkat pendidikannya hingga jenjang Sekolah Menengah Keatas (SMA). Dari hal tersebut maka akan menciptakan pengangguran karena masyarakat tidak mempunyai keahlian khusus atau tidak mampu memenuhi

kriteria dari lapangan kerja yang tersedia. Berikut ini merupakan tabel Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir di DKI Jakarta:



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan gambar 1.2 diatas tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tahun 2017 tingkat pengangguran berada di angka 7.14 persen, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, 2018 berada di angka 6.24 persen dan 2019 berada di angka 6.22 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sehingga mencapai angka 10.95 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 awal pandemi Covid-19. Setelah itu mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 berada pada angka 8.5 persen.

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Dalam teori *human capital* dijelaskan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan Pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat

memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya pembangunan bidang ekonomi. (Todaro 2006).

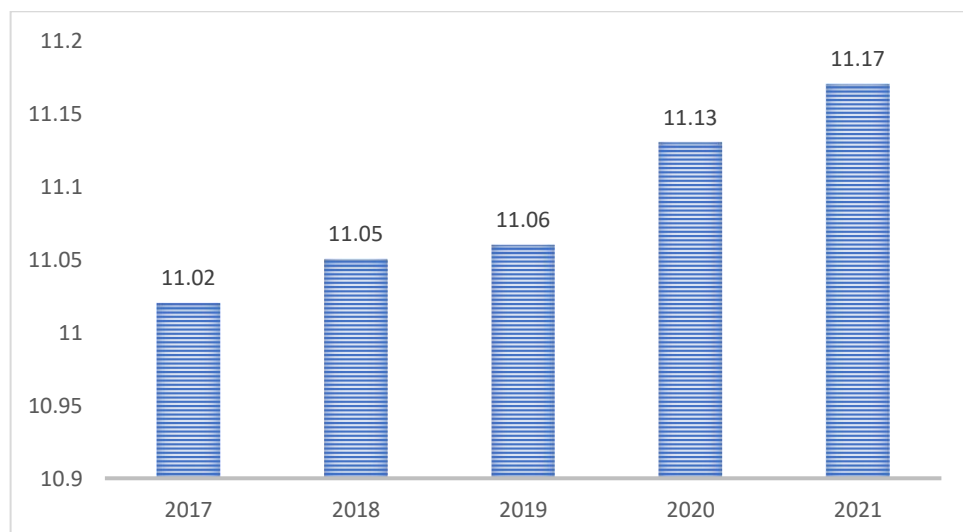
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro,2006). Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sebab tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat pengurangan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi tingkat keahlian begitu pula sebaliknya, bila tingkat pendidikan rendah maka keahlian yang dimiliki juga rendah sehingga tingkat penghasilan yang didapatkan akan rendah.

Peneliti memilih rata-rata lama sekolah sebagai indikator *human capital* karena rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya sekolah semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang mereka tempuh, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Dapat kita lihat pada gambar data rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:



Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta

Dilihat pada gambar 1.3 Perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta berada di angka 11.02 tahun, pada tahun 2018 berada di angka 11.05 tahun, pada tahun 2019 berada di angka 11.06 tahun, dan pada tahun selanjutnya meningkat, pada tahun 2020 berada di angka 11.13 tahun, sedangkan tahun 2021 berada di

angka 11.17 tahun. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta dikisaran angka 11-12 tahun.

Indikator lain yang juga tidak kalah penting adalah koefisien gini (*gini ratio*) yang merupakan ukuran pemerataan distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan (*poverty rate*) dan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) (Sjafrizal 2014: 166).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang baik. Pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan menggunakan angka koefisien gini. Angka koefisien gini pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, sehingga peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan dengan penambahan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Keterbatasan tersebut selanjutnya menyebabkan golongan masyarakat tersebut belum dapat hidup secara layak sebagaimana mestinya, sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Sjafrizal, 2014: 173).

Tabel 1.1 Gini Ratio (%) Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Gini Ratio
2017	0,413
2018	0,394
2019	0,394
2020	0,399
2021	0,409

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1.1 Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,413 persen, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,394 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,409 persen. Tingkat gini ratio terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,394 persen, dan tingkat gini ratio tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,413 persen.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah adalah masalah besar yang selalu dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Menurut (Oxfam, 2017) Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia, dimana harta empat orang terkaya di Indonesia sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin di negara tersebut. Dengan demikian, ketimpangan masalah distribusi pendapatan menjadi masalah besar yang tidak boleh diabaikan. Ketimpangan

memang tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikurangi hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam system pertumbuhannya (Spriyantoro, 2005).

Berdasarkan fenomena dan hal baru yang telah di uraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran, *Human Capital*, dan Distribusi Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, *human capital*, dan distribusi pendapatan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, *human capital*, dan distribusi pendapatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, *human capital*, dan distribusi pendapatan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, *human capital*, dan distribusi pendapatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan secara langsung teori-teori yang telah didapatkan, serta dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara melihat pengaruh pengangguran, *human capital*, dan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dengan metode pengumpulan data dan pengolahan data.
2. Bagi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Siliwangi.
4. Bagi keilmuan diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan guna pengembangan ilmu dan pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pengangguran, *human capital*, dan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan di suatu provinsi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, guna memperoleh data untuk menunjang usulan penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melalui situs www.bps.go.id.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dimulai pada bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2023. Berikut matriks jadwal penelitian penulis :

